

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 12 Tahun 2015, laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan seperti, dapat dipahami, relevan, materialitas, handal, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, lengkap, dapat dibandingkan, tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat (SAK-ETAP, 2016).

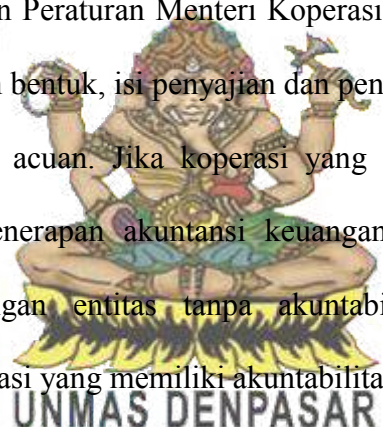
Menurut IAI, (2013) tujuan laporan keuangan sesuai SAK-ETAP adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki.

Upaya pemerintah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah dengan membentuk suatu badan usaha yaitu koperasi. Koperasi disini memiliki arti sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain. Koperasi dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 12 Tahun 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 12 Tahun 2015 menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi sebagai acuan. Jika koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka penerapan akuntansi keuangannya mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP). Sedangkan koperasi yang memiliki akuntabilitas publik, wajib menggunakan standar akuntansi keuangan Umum (SAK-Umum), seperti koperasi yang telah menerbitkan surat utang koperasi, obligasi koperasi, menerima modal penyertaan dan koperasi yang membentuk badan hukum lain.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Koperasi Per Desember 2021

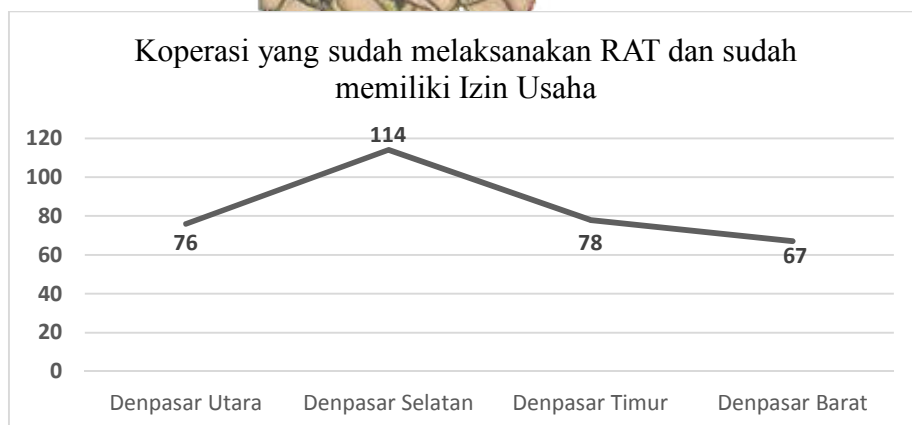


No	Kategori Koperasi	Koperasi			Berkas (Gross)			GAT (GNE)	Karyawan (Gross)			Manajemen (Gross)		
		JML	QNT	Tdk aktif	JML	L	P		JML	L	P	JML	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kab. Badung	387	373	88	48.908	29.728	19.180	112	8,38	429	383	33	43	3
2	Kab. Tabanan	260	800	800	93.620	92.989	30.000	220	1.888	904	1.190	227	206	20
3	Kab. Buleleng	483	660	80	179.478	81.978	43.280	388	2.739	1.103	1.176	384	1.80	38
4	Kab. Gianyar	1.277	354	120	290.628	200.586	12.130	297	4.433	2.400	2.000	900	187	58
5	Kab. Klungkung	881	132	20	48.294	27.480	17.611	134	723	588	587	27	25	2
6	Kab. Bangli	108	898	40	64.107	87.844	9.440	147	990	906	486	78	17	1
7	Kab. Karangasem	330	337	100	160.700	67.278	36.100	150	879	884	430	50	30	—
8	Kab. Sukawati	464	330	81	50.075	32.579	17.980	230	928	464	454	57	45	11
9	Kota Denpasar	1.344	400	941	147.327	88.809	50.487	440	2.112	1.214	1.298	211	154	47
10	Kabupaten Ponorogo	208	121	11	18.110	16.124	14.900	134	2.828	994	1.042	134	110	40
Jumlah		6.288	4.026	1.640	1.109.328	748.888	482.340	2.440	18.899	8.794	10.150	1.554	1.006	198

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, (2021)

Berdasarkan tabel rekapitulasi yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar. Jumlah koperasi di Kota Denpasar per Desember 2021 ada sebanyak 1.144 unit koperasi, dimana yang aktif sebanyak 503 unit koperasi dan yang tidak aktif sebanyak 641 unit koperasi. Pada akhir bulan September 2022 terdapat 6 unit koperasi yang dinyatakan tidak aktif oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar. Alasan koperasi tersebut dinyatakan tidak aktif karena sudah tidak pernah melaksanakan RAT selama 3 tahun terakhir, sehingga jumlah koperasi yang masih aktif hingga saat ini yang dinyatakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar ada sebanyak 497 unit koperasi.

Tabel 1.2
Jumlah Koperasi di Kota Denpasar



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, (2022)

Setelah melakukan observasi dan mengajukan permohonan data kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar. Ditemukan beberapa koperasi yang belum memiliki sertifikat (izin perkoperasian) dan ada juga yang izinnya sudah habis masa berlakunya, dari 497 unit koperasi tersebut hanya 335 unit koperasi yang sudah memiliki sertifikat atau izin perkoperasian yang lengkap, sisa nya sebanyak 162 unit koperasi tersebut ada yang masih dalam tahap

proses pembuatan ulang izin karena masa berlakunya sudah habis dan ada juga yang memang tidak mengajukan untuk mendapatkan izin tersebut dari awal. Koperasi yang tidak memiliki sertifikat tetap dinyatakan aktif dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya dengan syarat koperasi tersebut harus tetap melaksanakan RAT setiap tahunnya sesuai dengan aturan perkoperasian yang berlaku.

Keunggulan ketika sebuah koperasi memiliki izin atau sertifikat maka koperasi tersebut lebih mudah jika ingin mengajukan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga, dan dapat membuat investor lebih percaya untuk menanamkan modalnya pada koperasi tersebut. Kelemahan jika sebuah koperasi tidak memiliki sertifikat atau izin maka seringkali orang-orang berpikir bahwa koperasi yang didirikan tersebut tidak legal atau abal-abal sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada koperasi tersebut dan akan sulit untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Akhir-akhir ini, permasalahan terkait kualitas laporan keuangan koperasi semakin banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa mantan manajer sekaligus kolektor di Koperasi Srikandi, Ubung didakwa melakukan penggelapan uang nasabah sebesar Rp 260 juta. Atas penjelasan terdakwa, saksi tertarik untuk menyimpan uangnya dan mengikuti program simpanan berjangka dengan iming-iming bunga sebesar 1,25 persen perbulan yang bunganya langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah. Pada tanggal 14 Maret 2019 di dalam Pasar Pidada Ubung, saksi memberikan uang sebesar Rp 100 juta secara tunai kepada terdakwa untuk mengikuti program deposito tersebut. Beberapa bulan

kemudian saksi kembali tertarik mendepositokan uangnya sebesar Rp 100 juta secara tunai dan kembali mendepositokan uang sebesar Rp 60 juta di Koperasi Srikandi Ubung. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto, Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto (Radarbali.id, 2022). Dari kasus tersebut menimbulkan suatu perhatian yang mengarah pada kualitas laporan keuangan koperasi sehingga dapat di pertanyakan apakah setiap karyawan koperasi sudah memiliki pemahaman terkait standar pencatatan akuntansi yang seharusnya digunakan atau belum.

Menurut Matapere, dkk. (2020) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah apabila ia mengerti, pandai dan paham bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Menurut Arismawati, dkk. (2017) dalam menyusun suatu laporan keuangan, koperasi berpedoman pada prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Prospek implementasi SAK ETAP pada koperasi memerlukan pemahaman tentang apa itu SAK ETAP, sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Adiputra, dkk. (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK-ETAP, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi. Laporan keuangan koperasi yang

tidak disusun berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, sebaliknya dapat menyesatkan penggunaanya.

Pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP yang dimaksud disini adalah suatu proses dimana seseorang sudah mengerti dengan benar bagaimana cara pembuatan atau bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sehingga menjadi suatu laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP sehingga informasi yang disajikan lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan dan daya banding yang tinggi. Hasil penelitian Arismawati, dkk. (2017), Ayem, dkk. (2020), Adiputra, dkk. (2017), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Ismunawan & Septyani (2020), Iswara (2021), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam pengambilan keputusan bisnis, diperlukannya suatu informasi yang bernilai tinggi tentang laporan keuangan suatu organisasi. Tinggi rendahnya nilai suatu informasi tergantung pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang ada. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan (Rohali, dkk. 2020).

Wahyuni (2021), menyatakan bahwa sistem informasi dapat dikatakan efektif apabila sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas bagi suatu organisasi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola informasi keuangan secara cepat dan akurat (Riyadi, 2020).

Sistem informasi akuntansi yang dimaksud disini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan secara tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya dengan bantuan adanya teknologi. Hasil penelitian Lestari & Dewi (2020), Rohmah *et al.*, (2020), Riyadi (2020), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Aprianti (2022), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain harus memiliki sistem informasi akuntansi yang efektif, pengendalian internal akuntansi yang efektif juga diperlukan. Sistem pengendalian internal yang efektif akan menjamin pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran (Dewi, dkk. 2017).

Menurut Nugraheta (2017), sistem pengendalian internal akuntansi memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas

informasi, dan mencegah *inkonsistensi* dan memudahkan proses audit laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal akuntansi yang dimaksud disini merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam mencapai tujuan koperasi agar mampu memberikan keyakinan terkait keandalan laporan keuangan sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Laporan keuangan dan sistem pengendalian internal akuntansi berbanding lurus, jika pengendalian internal semakin tinggi maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Aditya & Surjono (2017), Aprianti (2022), Iswara (2021), Wahyuni (2021), menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Ardilia (2021), menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.



Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami dan berkompeten dalam bidang akuntansi, sebab SDM merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu koperasi. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang karyawan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga karyawan tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Wijayanti, 2017). Karyawan dengan SDM yang kompeten akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga laporan

keuangan selesai tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh koperasi (Aprianti, 2022).

Kegagalan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi diharapkan pihak pengelola keuangan khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance* (Wijayanti, 2017). Hasil penelitian Tawaqal & Suparno (2017), Ismunawan & Septyani (2020), Anggreni (2021), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Wijayanti (2017), Nugraheta (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Setiap koperasi harus memiliki pengawas internal yang memadai dan mampu menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan lancar, dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan koperasi dan terjadinya praktek – praktek yang tidak sehat. Pengawas internal meliputi strategi dan ukuran yang diarahkan untuk menjaga aset organisasi, struktur organisasi, meningkatkan efektivitas dan dipatuhinya kebijakan pimpinan, memeriksa ketepatan dan kualitas informasi keuangan. Pengaruh badan pengawas yaitu secara efektif

mengawasi praktik akuntansi, kebijakan operasional, pelaporan keuangan, dan menjadi penghubung antara pengelola dengan auditor eksternal (Anggreni, 2021).

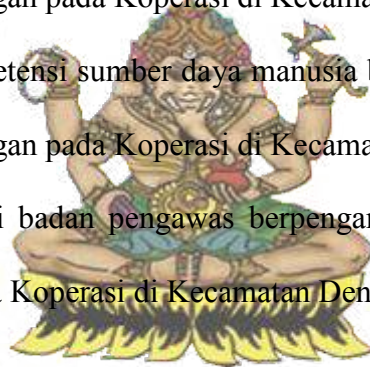
Salah satu penerapan dari struktur pengawasan internal adalah dengan adanya auditor internal. Yang menjadi auditor disini adalah badan pengawas koperasi yang memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan, dimana ia memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektivitas usaha koperasi, maka dalam kegiatannya badan pengawas diatur dalam (UU RI No. 5 Tahun ,1992 Pasal 38-40). Hasil penelitian Pratiwi *et al.*, (2021), Bhegawati & Novarini (2021), Sinaranata *et al.*, (2019), yang menyatakan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Anggreni (2021), Pramesti (2021), menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan membahasnya secara lebih rinci tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi berbasis SAK ETAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal akuntansi, kompetensi sumber daya manusia dan fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berbasis SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara?
3. Apakah pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara?
5. Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara?



UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi berbasis SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara
2. Untuk mengetahui pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara
5. Untuk mengetahui pengaruh fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi di Kecamatan Denpasar Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan pembandingan penelitian terdahulu serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kualitas laporan keuangan koperasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang sekiranya meneliti topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pengelola Koperasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik, agar informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakai internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness Theory*)

Menurut Wahyuni (2021), teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Teori kegunaan keputusan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat.

SFAC bukan merupakan bagian dari FASB tetapi merupakan sumber-sumber otoritatif GAAP yang diakui oleh FASB untuk diterapkan pada entitas non-pemerintah. Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Tingkat kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan perlu dipertimbangkan dalam penyajian informasi akuntansi.

SFAC No.8 menetapkan tujuan-tujuan dan konsep-konsep fundamental yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengembangan akuntansi keuangan dan pedoman pelaporan. Konsep-konsep fundamental memiliki arti bahwa konsep-konsep lain yang mengalir dari pengakuan dan pengukuran serta

pengulangan referensi akan diperlukan untuk membentuk, menafsirkan, dan menerapkan pedoman akuntansi dan pelaporan.

SFAC No. 8 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk karakteristik kualitas *fundamental* dan karakteristik kualitas *ideal*. Karakteristik *fundamental* dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevansi dan representasi atas informasi keuangan yang relevan sehingga mampu memberikan perbedaan dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Representasi didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, serta dapat mewakili apa yang akan digambarkan.

Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi dan membenarkan harapannya.

Kandungan karakteristik kualitas *fundamental* kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai

relevan, yaitu nilai prediksi dan nilai konfirmasi (umpan balik). Komponen-komponen kandungan representasi, yaitu lengkap, netral dan materialitas. Selain itu juga terdapat karakteristik kualitas *ideal* sebagai penghubung antara *kualitas fundamental*, yaitu dapat dibandingkan, keandalan, ketepatan waktu, dan dapat dipahami sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan informasi dari sisi *relevance* dan *representation*.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK-ETAP (2016), laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan seperti, dapat dipahami, relevan, materialitas, andal, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, lengkap, dapat dibandingkan, tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu (Hartono, dkk. 2018).

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Melalui laporan keuangan ini maka, para pemakai informasi akuntansi dapat mengambil keputusan. Pengelolaan atau manajer dapat menilai apakah kinerjanya dalam periode yang lalu mendatangkan keuntungan atau tidak. Tujuan laporan

keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015, proses pelaporan keuangan koperasi terdiri dari laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penjelasan terkait 5 jenis laporan keuangan diatas adalah sebagai berikut (SAK-ETAP, 2016) :

1. Laporan neraca

Laporan neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Mencakup, kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha, dan ekuitas.

2. Laporan perhitungan hasil usaha/ Laba rugi

Laporan perhitungan hasil usaha menunjukkan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Unsur laporan yang terkait dalam pengukuran yaitu penghasilan dan beban yang mencakup; pendapatan, beban keuangan atau operasional, dan laba/rugi neto.

3. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan ekuitas/modal merupakan suatu laporan yang menunjukkan ringkasan perubahan modal dan penyebabnya yakni jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.

4. Laporan arus kas

Dalam laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas akan menunjukkan bahwa arus dana serta perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama periode akuntansi atau tahun buku yang bersangkutan dengan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan Laporan keuangan berisi suatu rangkuman kebijakan akuntansi yang sangat signifikan. Dalam catatan atas laporan keuangan koperasi harus mengungkapkan :

1. Informasi umum mengenai sejarah pendirian, badan hukum, jenis koperasi serta domisili alamat kantor yang terdaftar, ijin usaha, NPWP, Kelompok Lapangan Usaha (KLU).
2. Daftar pengurus dan pengawas koperasi
3. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas usaha utamanya
4. Kebijakan akuntansi yang dianut.
5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan yang penting
6. Kejadian setelah tanggal neraca
7. Tanggal penjelasan laporan keuangan.

SAK ETAP menjelaskan penyajian laporan keuangan secara wajar ke dalam sub bagian, sebagai berikut (SAK ETAP, 2009:14)

1. Penyajian wajar

Menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh

transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Kepatuhan terhadap SAK ETAP Adalah kepatuhan suatu entitas terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

3. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Frekuensi pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan, termasuk informasi komparatif minimum satu tahun sekali.

5. Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan antar periode harus *konsisten* kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasi bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.

6. Informasi komparatif

Informasi harus di ungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).

7. Materialitas dan agregasi

Pos – pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material tidak di gabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

8. Laporan keuangan lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

9. Identifikasi laporan keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus di bedakan dari informasi dan lain dalam laporan tersebut.



Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015, pemakai laporan keuangan koperasi adalah :

1. Anggota koperasi,
2. Pengurus,
3. Pengawas,
4. Pemerintah,
5. Kreditur,
6. Pihak lain yang berkepentingan

2.1.3 Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP

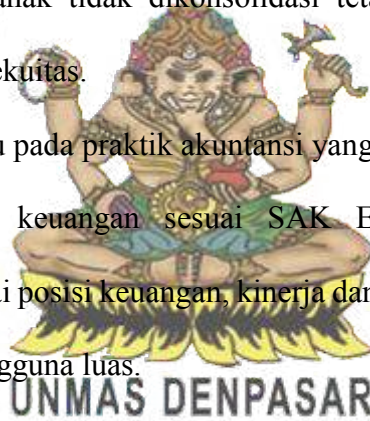
Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti mengetahui atau mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi (KBBI, 2008). Menurut Arismawati, dkk, (2017), pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang proses akuntansi, baik itu secara manual atau menggunakan sistem dan teknologi komputerisasi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila ia mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan, dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas sistem yang signifikan sehingga di harapkan mampu menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan akan semakin luas.

Menurut Wahyuni (2021), entitas tanpa akuntabilitas sistem adalah sebagai berikut :

1. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah:

- a. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas sistem signifikan, dan
 - b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.
2. SAK ETAP menggunakan acuan IFRS untuk *Small Medium Enterprises* (SME) yang lebih sederhana. Lebih sederhana yang dimaksud antara lain:
- a. Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan.
 - b. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas.
 - c. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan
 - d. Laporan keuangan sesuai SAK ETAP menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna luas.
3. SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.
4. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK ETAP.



Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan koperasi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP, 2016) :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang di ambil atas dasar laporan keuangan. Material tergantung pada pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*).

4. Keandalan

Agar bermanfaat, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu).

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

9. Tepat waktu

Agar relevan, Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Menurut Adiati (2018), implementasi siklus laporan keuangan SAK ETAP yang telah dikembangkan, sehingga diperoleh indikator yang dapat mengukur siklus laporan SAK ETAP, antara lain:

- a. Mengidentifikasi bukti transaksi penerimaan kas.
- b. Mengidentifikasi bukti transaksi pengeluaran kas.
- c. Mencatat (menjurnal) transaksi ke dalam buku jurnal
- d. Memposting jurnal ke buku besar
- e. Membuat neraca saldo
- f. Membuat jurnal penyesuaian
- g. Menyusun neraca lajur

Menurut Mairlinda (2022), manfaat mengimplementasikan SAK ETAP di dalam laporan keuangan berikut, antara lain :

1. Dapat menyusun laporan keuangan sendiri
2. Menyusun laporan keuangan lebih sederhana dibandingkan PSAK IFRS sehingga memberi kemudahan dalam implementasinya
3. Laporan keuangan dapat menjadi dasar opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk memperoleh dana tambahan untuk pengembangan usaha, seperti pinjaman dari kreditur (bank).
4. Memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan berbagai ukuran lain bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial lainnya.

Menurut Wahyuni (2021), perbedaan SAK ETAP dengan PSAK-IFRS sehingga koperasi harus menggunakan SAK ETAP adalah sebagai berikut :

1. Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK – IFRS cenderung *complicated* dan rumit.
2. SAK ETAP cenderung menggunakan basis stewardship dimana manajer lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan organisasi sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada stakeholder sehingga cenderung menggunakan prinsip reliability, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan pengguna dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
3. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan (yang dimaksud pajak tangguhan disini adalah beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak)

4. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
5. SAK ETAP menggunakan *cost model* (biaya historis) untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
6. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
7. SAK ETAP hanya menggunakan *cost model* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK-IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi (model revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan).

2.1.4 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Wahyuni (2021), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang melaksanakan berbagai operasi dalam rangka menghasilkan informasi yang relevan, di antaranya mencatat data ekonomi, memproses, dan menganalisa data serta menyajikan informasi kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan. Sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam memproses data dan transaksi keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi harus dapat menyediakan informasi secara relevan, tepat, akurat dan lengkap. Sistem informasi bisa di katakan efektif apabila sistem informasi tersebut mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan

mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya.

Ari *et al.*, (2020) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari empat hal penting yaitu sebagai berikut:

1. Input (masukan) akuntansi

Adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya.

2. Proses

Merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.

3. Output (keluaran) akuntansi

Adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima laporan tersebut pada saat disusun, disajikan, dan pengungkapannya harus sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan.

4. Pengguna informasi keuangan

Adalah pihak yang memakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu pihak internal dan eksternal”.

Menurut Weygand, dkk. (2014) sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Prinsip tersebut mencakup :

1. Keefektifan biaya

Sistem informasi akuntansi harus efektif terhadap biaya. Artinya manfaat dari informasi yang diberikan harus melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu sistem.

2. Tingkat kegunaan

Agar berguna, informasi harus dapat dimengerti, relevan, dapat diandalkan, tepat waktu, dan akurat. Pembuatan sistem akuntansi harus mempertimbangkan kebutuhan dan tingkat pengetahuan berbagai macam pengguna.

3. Fleksibilitas

Sistem akuntansi seharusnya dapat mengakomodasi berbagai macam pengguna dan mengubah informasi yang dibutuhkan. Sistem harus cukup *fleksibel* dalam memenuhi perubahan permintaan informasi yang dibutuhkan.

Menurut Sutra, dkk. (2020) sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang tepat dan akurat agar aktivitas dalam rantai nilai dan dijalankan dengan efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal ini dengan cara :

1. Memperbaiki kualitas serta mengurangi biaya untuk menghasilkan produk maupun jasa. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik

dapat memberikan informasi apabila terjadi proses produksi yang kurang baik atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat segera diperbaiki. Hal ini tentu akan mengurangi biaya untuk perbaikan dan jumlah yang lebih besar.

2. Memperbaiki efisiensi sistem akuntansi yang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang tepat waktu.
3. Memperbaiki pengambilan keputusan sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang tepat waktu.
4. Berbagai pengetahuan sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat mempermudah proses berbagai pengetahuan dan keahlian, yang selanjutnya dapat memperbaiki proses operasi perusahaan dan bahkan memberikan keunggulan yang kompetitif. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara ringkas bahwa informasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan aktivitas perusahaan, karena informasi dapat mengurangi ketidakpastian terhadap tindakan yang telah dilakukan. Informasi dapat berfungsi menyadarkan, artinya bahwa informasi merupakan alat yang mampu memberikan gambaran mengenai kemungkinan atau peluang yang dimiliki perusahaan.

Menurut Buana (2022), Secara garis besar, sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem informasi akuntansi (SIA) dan sistem informasi manajemen (SIM). Perbedaan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen terletak pada ruang lingkup dan konsep transaksi. :

Perbedaan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen berdasarkan ruang lingkupnya yaitu :

1. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan hanya informasi keuangan.
2. Sistem informasi manajemen mengumpulkan mengklasifikasikan, memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan semua tipe informasi.

Perbedaan antara SIA dan SIM terletak pada konsep transaksi. Transaksi adalah peristiwa yang memiliki efek bagi organisasi dan diproses oleh sistem informasi sebagai suatu unit kerja. Transaksi terbagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Transaksi finansial

Merupakan peristiwa ekonomi yang berdampak langsung pada aset dan modal organisasi tergambar dalam neraca serta dapat diukur dalam ukuran moneter.

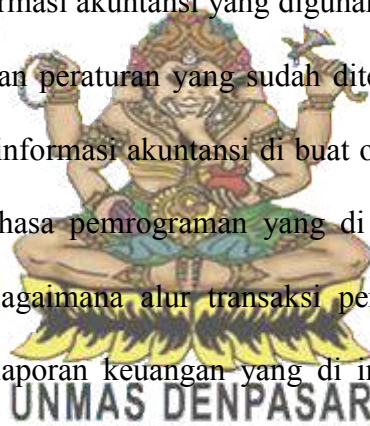
2. Transaksi non finansial

Merupakan peristiwa yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, tetapi tidak tergambar dalam neraca dan bukan merupakan unit *moneter*, contohnya adalah penambahan *supplier* baru dengan data-data terkait.

Sistem informasi manajemen memproses transaksi non finansial yang tidak diproses oleh SIA. Manajemen seringkali membutuhkan informasi yang tidak diproses oleh kapasitas SIA. Contoh aktivitas yang dilakukan SIM

adalah *portofolio management systems, capital budgeting systems, market analysis, product analysis, warehouse organization, scheduling, delivery scheduling, job skill tracking system, employee benefits system*, dan sebagainya. Subsistem SIA memproses transaksi finansial dan non finansial yang memiliki efek langsung pada proses transaksi finansial. Contohnya adalah pembaruan data mengenai perubahan data konsumen maupun karyawan. Meskipun secara teknis merupakan transaksi non finansial, perubahan tersebut memberi informasi yang vital untuk memproses penjualan atau penggajian pada konsumen atau karyawan

Sistem informasi akuntansi yang digunakan di setiap koperasi berbeda beda sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam suatu koperasi tersebut, sistem informasi akuntansi di buat oleh setiap perusahaan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang di mana dalam sistem tersebut sudah memuat bagaimana alur transaksi pencatatan dari bukti transaksi hingga menjadi laporan keuangan yang di inginkan yang pastinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjadi sistem yang dapat digunakan.



2.1.5 Pengendalian Internal Akuntansi

Menurut Wahyuni (2021), pengendalian internal dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pengendalian Internal Akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data

akuntansi. Sebagai contoh adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian Administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian di ambil tindakan.

Menurut Wahyuni (2021), unsur-unsur sistem pengendalian internal, meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan



Menjamin tersedianya laporan keuangan yang dapat di percaya, mengurangi resiko terjadinya penyimpangan serta pelanggaran dalam organisasi adalah dengan menerapkan pengendalian internal akuntansi agar dapat berlaku efektif. Semakin patuh seorang accounting dalam mengikuti kebijakan atau peraturan yang berlaku maka dapat di pastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai standar, dapat dipercaya, dan setidaknya dapat mengurangi terjadinya penyimpangan

Menurut Wahyuni (2021), jika pengendalian internal semakin efektif, maka akan dapat mengatasi permasalahan rendahnya kualitas laporan keuangan. Menurut Latifah (2020), laporan keuangan yang memiliki kualitas

nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Nugraheta (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal akuntansi memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah *inkonsistensi* dan memudahkan proses audit laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi. Tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang memadai sistem informasi akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendalian internal juga dapat digunakan untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam lingkungan pekerjaan. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat

kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, evaluasi kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia (Latifah, 2020). Menurut Arismawati, dkk. (2017) sumber daya manusia dalam suatu badan usaha koperasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan koperasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Ismunawan, dkk. (2020) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*skill*)

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal. Misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam

berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

3. Sikap (*attitude*)

Merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilakukan sebaik-baiknya.

2.1.7 Fungsi Badan Pengawas

Koperasi sebagai organisasi dibidang ekonomi yang sangat rawan terhadap resiko kerugian atau resiko lainnya yang timbul dari penyelewengan dan kecurangan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh karyawan. Untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan mencegah resiko-resiko tersebut maka diperlukan sebuah pengawasan.

Fungsi badan pengawas disini adalah pengawas koperasi yang merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi disamping rapat anggota dan pengurus koperasi. Pengawas koperasi diharapkan mampu menjamin bahwa pelaksanaan operasional sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan dan mencegah terjadinya praktek – praktek yang tidak sehat. Oleh sebab itu maka setiap koperasi harus memiliki badan pengawas koperasi.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana. Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi disamping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas yang berdiri sejajar. Pengertian pengawas dan pengurus mempunyai kedudukan yang sejajar dalam koperasi, dalam hal ini tidak ada yang lebih atas dan tidak saling membawahi diantara kedua perangkat organisasi koperasi tersebut. Disebut mempunyai kedudukan sejajar karena pada hakikatnya kedua-duanya melaksanakan amanat rapat anggota di dalam mengelola kegiatan koperasi sehari-hari meskipun dalam fungsi yang berbeda. Oleh karenanya dalam kegiatan sehari-hari antara pengurus dengan pengawas harus sinergi dalam arti saling menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas masing-masing. Pengurus harus dapat memberi kesempatan dan bantuan yang seluas-luasnya bagi pengawas dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya pengawas harus mampu menunjukkan hal-hal yang dirasa kurang tepat atau bertentangan dengan keputusan rapat anggota dengan memberikan jalan keluar kepada pengurus agar secepatnya dapat diambil langkah-langkah perbaikan oleh pengurus. Pengawas harus juga secara aktif memberikan masukan dan saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak. Jadi pengawas adalah mitra atau partner di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pengawas koperasi sebagaimana tertuang dalam pasal 38-39 UU Nomor 25 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pasal 38 ayat (2) Selanjutnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Jelaslah bagi kita bahwa pengawas koperasi tidak bertanggung jawab kepada pengurus melainkan kepada rapat anggota. Tugas dan wewenang pengawas koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 39, secara umum, pengawas koperasi bertugas mengawasi manajemen koperasi dan membuat laporan tahunan. Secara rinci tugas dan wewenang pengawas koperasi adalah:

a. Tugas Pengawas Koperasi :



- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

b. Wewenang Pengawas Koperasi :

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang syarat pemilihan pengawas koperasi adalah :

1. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut
2. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi
3. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan
4. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali pada saat pendirian koperasi :
 1. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
 2. Pengawas terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai Keputusan Rapat Anggota.
 3. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
5. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga



2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Ayem *et al.*, (2020) meneliti tentang pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, tingkat kompetensi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan pada 11 Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar dengan teknik pengambilan sampel

secara acak dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berdasarkan variabel standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP), dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat kompetensi berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi pegawai republik indonesia (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo).

Latifah (2020) meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan pada 15 Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan kriteria Kasubag Keuangan, Bendahara dan *Staff* Keuangan. Jumlah sampel sebanyak 45 responden, namun karena ada 4 data yang rusak, maka hanya 41 data yang bisa diolah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah).

Anggreni (2021) meneliti tentang pengaruh etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan pada 36 LPD di Kota Denpasar. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yang terdiri dari Ketua LPD, Badan Pengawas, Sekretaris dan Bendahara. Jumlah sampel sebanyak 144 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan etika kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif sedangkan fungsi badan pengawas berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) Se-Kota Denpasar.

Iswara (2021) meneliti tentang pengaruh profesionalisme, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Tabanan. Penelitian ini dilakukan pada 12 LPD yang terdaftar di LPLPD Kabupaten Tabanan. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebar dengan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling jenuh* (sensus) yang terdiri dari Ketua LPD, *Accounting*, Bendahara LPD dan Badan Pengawas. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 48 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh positif sedangkan profesionalisme, dan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Tabanan.

Wahyuni (2021) meneliti tentang analisis Faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Koperasi Se-Kecamatan Gianyar. Penelitian ini dilakukan di seluruh koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi pada Kecamatan Gianyar yang berjumlah sebanyak 284 Unit Koperasi. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yang terdiri dari Ketua Koperasi, Bagian *Accounting*, Bagian *Accounting* yang memiliki pengalaman dibidang yang sama minimal 1 tahun. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 295 responden. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan koperasi Se-Kecamatan Gianyar.